

PENGEMBANGAN BUM Desa SEBAGAI INDUSTRI PROMOSI EKSPORT DENGAN PENDEKATAN NEW INSTITUSIONAL DI DESA WINONG PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

Khumaidi¹, Agus Prianto²

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent author: Agus.prianto@yudharta.ac.id

Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The global era has a real impact on village development which must respond to the challenges of globalization so that village governments need to carry out institutional-based economic development and local potential development in the NIE (New Institutional Economic) system.

The purpose of this writing is to determine the Development Of Bum Desa As An Export Promotion Industry With A New Institutional Approach in Winong Village, Gempol District, East Java. The research method uses a qualitative descriptive approach and is analyzed interactively. The results of the research show that strengthening the village government system in allocating budgets is a sign that the government is present in the midst of a global competitive system to assess global market failures and accelerate the development of local potential as the embodiment of a global village. It is proven that Winong Village is able to answer these challenges by contributing to community development through business. productive economy.

Keywords: BUMDes; Globalization; New Institutional Approach; Village Potential

Abstrak

Era global memberikan dampak yang nyata terhadap perkembangan desa yang harus menjawab tantangan globalisasi sehingga diperlukan pemerintah desa melakukan pengembangan ekonomi berbasis kelembagaan dan potensi local yang pengembangan pada sistem NIE (New Institutional Economic). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Pengembangan BUM Desa Sebagai Industri Promosi Ekспорт Dengan Pendekatan New Institutional di Desa Winong Kecamatan Gempol Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis secara interaktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan system pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran menjadi tanda bahwa pemerintah hadir ditengah system persaingan global untuk menakar akan kegagalan pasar global dan percepatan pembanguan potensi lokal sebagai perwujudan desa global, terbukti Desa Winong mampu menjawab tantangan tersebut dengan berkontribusi apda pengembangan warga melalui usaha ekonomi produktif.

Kata Kunci: BUMDes; Globalisasi; Pendekatan New Institutional; Potensi Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai pilar pembangunan di era global cukup santer dan memiliki prospek yang besar dalam menghadapi globalisasi (Larsson, 2001). Banyak desa yang berpotensi sumber daya alam maritime dan pertanian yang faktanya kantong kemiskinan justru ada pada daerah pedesaan, yang nilai kesejahteraan dilihat berdasarkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sesuai data BPS (2021), pada bulan september 2021 NTP naik sebesar 0,52% dari 100,06 menjadi 100,58 dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami penurunan. Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,42%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sebesar 0,10 %. Jika dibandingkan dengan bulan September 2020, perkembangan NTP bulan September 2021 (year-on-year) mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Sedangkan perkembangan NTP bulan September 2021 dibandingkan bulan Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 0,22 %.

Melihat perkembangan NTP pada subsector dibulan september 2021 dibanding bulan september 2020, bahwa terdapat subsector yang mengalami kenaikan NTP pada subsector Perikanan sebesar 3,21% dan subsector hortikultural sebesar 3,21% dan subsector yang mengalami penurunan pada tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada sector perikanan memiliki prospek yang baik sebagai pengembangan usaha komoditi ekspor yang jika dilakukan maka mampu menjadi alternative atas defisitnya neraca perdagangan Indonesia baik sector Migas dan Non-Migas (BPS,2017) yang sangat fluktuatif. Sedangkan nilai ekspor provinsi Jawa Timur pada bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 13,79 persen dibandingkan Desember 2020 dari USD 1,78 miliar turun menjadi USD1,54 miliar. Turunnya ekspor sebab melemahnya sebesar 9,18 persen yaitu dari USD1,52 miliar menjadi USD1,38 miliar. "Nilai ekspor nonmigas tersebut menyumbang sebesar 90,14 persen dari total ekspor Jatim pada Januari 2021. Dan jika dibandingkan dengan Januari 2020 nilai ekspor nonmigas ini mengalami penurunan sebesar 21,40 persen.

Naiknya NTP pada subsector perikanan dan nilai ekspor yang melemah menunjukan bahwa dalam proses perdagangan pada sector perikanan hanya penjualan pada sekmen pasar lokal, hal ini sangat diperlukan perkembangan untuk menjadikan komoditas Industri Pengembangan Ekspor (IPE). Ekspor merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya dapat menstimulasi peningkatan Produk Domestik Bruto (Miharami dan tanti, 2018). Pengembangan potensi perikanan dikabupaten pasuruan bisa berbasis pedesaan, pembangunan di era global tidak hanya pada skala nasional melainkan sudah pada wilayah lokal pedesaan. Kebijakan pembangunan desa menjadi desa global maka memiliki konsekuensi terhadap rekonstitusi lokalitas pedesaan, pemerintah dan intervensi Negara (Chen, Cheng, 2019).

Penelitian ini menarik pada potensi desa winong yang memiliki 7 wilayah administratif (Dusun) dengan budidaya peternak lele sejumlah 45 peternak lele. Dalam waktu satu bulan menghasilkan sekitar 800-1000 kg. Selama ini pemasaran hanya pada wilayah desa pada bumdes guna menyediakan lele jumbo buat umkm, penyediaan pakan yang dapat diperoleh secara kredit, dan penyediaan modal. Kedepan rencana akan mendirikan toko khusus untuk jual beli produksi desa winong.

Konsekuensi menganalisis reformasi kelembagaan pedesaan dan inovasi kebijakan pemerintah daerah pada tingkatan desa sebagai upaya menghadapi globalisasi yang mensyaratkan untuk identifikasi jalur implementasi kebijakan pemerintah daerah dan logika umum tindakan lokal (pemerintah desa). Kemudian, kerangka tersebut dikaji melalui studi kasus desa Winong kabupaten pasuruan provinsi jawa timur, terutama memperhatikan kekuatan operasional dalam pemulihan lokalitas pedesaan dengan pendekatan New Institutional Economic (NIE).

Intervensi pemerintah yang progresif dalam pembangunan pedesaan bertujuan untuk menata kembali sektor pertanian dan pedesaan untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam globalisasi untuk memasuki dalam pasar global. Sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana kreatif kebijakan nasional dan koordinator tindakan lokal yang mengarah pada pemulihan lokalitas pedesaan dalam hal industri, masyarakat dan ruang lingkup.

Pendekatan NIE dalam pengembangan komodity lokal menjadi eksport dalam pendekatan NIE sangat bisa untuk mengatasi atas kompetisi pasar global. Ketidak mampuan Indonesia alam pasar global disebabkan ketidak mampuan dalam perebutan pasar peluang opportunity Shared (simbolon,2013) hal ini disebabkan dalam persaingan pasar global terdapat persaingan pasar tidak sempurna dan biaya transaksi yang tinggi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Furubotn and Richter, 1993 dan Harris, et al.,1995).

Pengembangan potensi lokal dalam prepektif NIE dapat mengkondisikan percepatan terhadap pengembangan potensi lokal budidaya ikan lele menjadi komoditas Industri Promosi eksport (IPE), sebab peluangnya dapat menjadi pengganti atas tingginya import dan rendahnya substitusi Eksport (Krueger, 1978; Asryad 2004) oleh sebab itu perlu untuk membangun wawasan global village sebagai jawaban atas globalisasi dan rekonstitusi pedesaan dan pemerintah desa dapat mengembangkan potensi lokal guna menciptakan kesejahteraan umum bersama ditingkat masyarakat pedesaan.

Dinamisasi kehidupan dalam akademisi memberikan pengaruh kuat atas perkembangan pemikiran teori ekonomi baik bersifat mainstream maupun non-mainstream didalam perdebatan perkembangan keilmuan ekonomi dari pemikiran kelembagaan lama (old Institutional economic atau OIE), Ekonomi Neo Klasik (Neo Clasical Economics / NCE) dan

Economic Kelembagaan Baru (New Institutional Economics / NIE) perdebatan kali pertama disebabkan pemikiran Ronald Coase pada tahun 1991 dengan tulisannya yang berjudul 'The Nature Of The Firm' (1937) dan 'The Problem Of Social Cost' (1960), Douglas C. North pada tahun 1993 yang berjudul Institutions and Commitment Credibility, Elinor Ostrom dalam bukunya berjudul Economic Governance, especially Commons) dan Oliver E. Williamson dalam analisis yang berjudul Economic Governance, especially Boundaries of the Firm.

Perbedaan dalam pemikiran sebagaimana paradigma ekonomi semua membicarakan tentang sistem pasar yang menjadi pemikiran Klasik sebagaimana mencirikan manusia bersifat rasional, berfikir logis, dan bekerja menurut perintah yang diberikan pimpinan Menurut Dimock (1960) pandangan administrasi negara klasik menyangkut kegiatan pemerintahan di dalam pelaksanaan kekuasaan politiknya hal ini membenarkan atas aliran klasik dengan teori manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor (1856-1915) mengartikan sasaran manajemen adalah kemakmuran yang maksimum bagi pengusaha dan karyawan. Pada alur pemikiran ini dikembangkan prinsip, fungsi, unsur dan proses administrasi negara dengan kriteria dasar efisiensi, ekonomi dan rasionalitas Alur pemikiran menekankan pada peningkatan keuntungan optimalitas pareto dengan mengakui system pasar akan mampu menyediakan prinsip Supply and Demand (Smith, 1759; Wardani, 2009) dengan berprinsip pada

Sejalan dengan itu pemikiran Klasik mendapat kritikan atas kelemahan yang di sebabkan pada system klasik berprinsip pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat investasi ($G=f(I)$) dengan berpedoman pada factor;

1. Division of Labour/ pembagian kerja. Menunjukkan pentingnya peranan pasar dimana pasar yang sempit akan membatasi pembagian kerja.
2. Invisible hand (tangan yang tidak kelihatan dan merupakan mekanisme ekonomi pasar). Invisible hand akan membawa faktor produksi menjadi lebih efisien dalam pasar bebas.
3. Akumulasi modal. Merupakan fungsi dari tingkat keuntungan.

Dengan memiliki ketidak pemerataan terhadap perwujudan welfare state / Negara kesejahteraan maka dari itu dibutuhkan epistemologi baru terhadap ekonomi klasik dengan memasukkan factor humanistic sebagai sebuah pendekatannya (Haris et, al 1995 dan North, 1890). Hal ini juga sejalan dengan sebuah pendekatan terhadap perkembangan keilmuan ekonomi yang menempatkan paradigm OIE (Old Institution Economic) sebagai sebuah paradigma pendekatan ekonomi yang menempatkan perilaku ekonomi didasarkan pada preferensi umum yang berlaku pada kondisi tertentu. Begitu juga pada paradigma NCE (New Clasic Economic) menekankan atas pemikiran ekonomi yang diletakkan atas dasar prinsip pasar dengan berasumsi informasi yang sempurna (perfection of information) oleh para

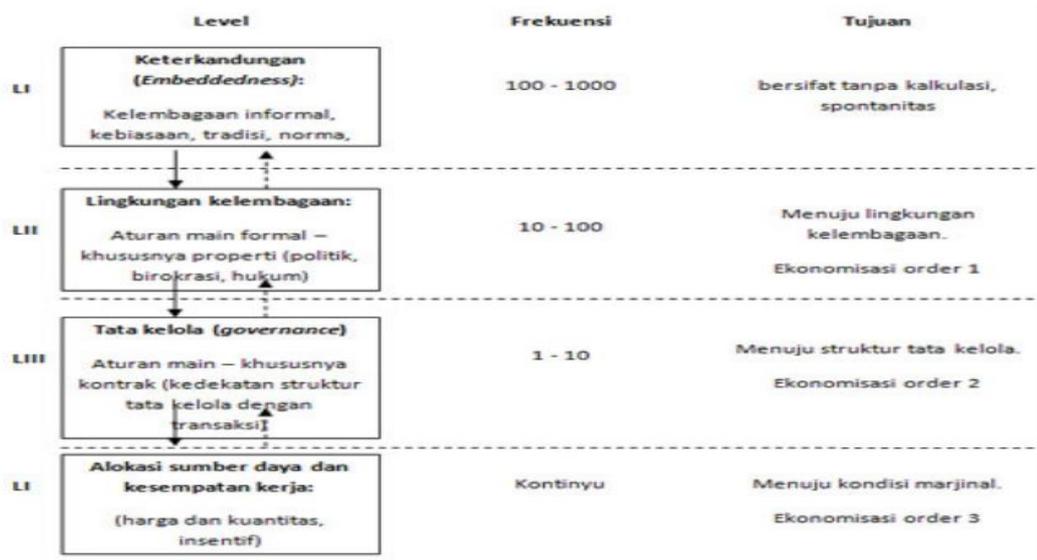
pelaku ekonomi dan juga adanya asumsi zero transaction cost. Kedua asumsi ini mendasarkan atas adanya system kompetitif atas persaingan sempurna perfection competition (Furubotn and Ruchter, 1993 dan North, 1990).

Pendekatan teori OIE dan NCE dianggap kurang mampu menjawab terhadap penyelenggaraan system welfare state dengan menjadi persoalan ekonomi terutama bagi Negara berkembang (Haris et,all. 1995 h.17-20) menjelaskan bahwa system ekonomi yang dibangun dari prespektif pendekatan OIE dan NCE lebih pada persoalan akan asimetris informasi dan juga tingginya biaya transaksi sehingga hal ini mendorong tinggi pemburu rente dalam proses perdagangan (North 1990; Haris et, all. 1995).

Dari kritik kedua paradigma tersebut, dijawab sebagai antitesi paradigma NIE (New Institutional Economic) dengan mengembangan perekonomian secara formal dan informal Pendekatan ini berkontribusi terhadap persoalan neo-klasik dalam wacana pembangunan. NIE telah mendorong perekonomian ekonomi bekerja, yang hanya bisa memberikan kontribusi pengembangan pada fondasi mikro ekonomi dan dinamika institusi dan organisasi sebagai titik tolak terhadap keterpurukan kondisi ekonomi sebab setting ekonomi global. New Institutional Ekonomi menjadi titik tolak terhadap perubahan dan pertumbuhan ekonomi (Furubotn and Richter, 1993 dan Harris, et al.,1995).

Pola pembangunan ekonomi NIE bersifat lebih pada formal dan informal. Williamson 2000 telah menjelaskan bahwa perubahan institusi ekonomi baru memiliki ciri akan perubahan pada 4 level yakni level pertama menekankan pada institusi ekonomi yang melihat pada aspek social theory yakni pada subaspek tradisi, agama, norma , adat dan mindset. Level ke dua pada lingkungan kelembagaan dengan mengikat kepemilikan dengan aturan main atas akses hak dan kewajiban sebagai syarat kelembagaan ekonomisasi level pertama. Level ketiga pada tahapan bagaimana hak dan kewajiban dimainkan sebagai struktur tata kelola ekonomisasi pada level kedua. Level keempat fungsi produksi terhadap penyesuaian prize dan output bersifat lebih atau kurang kontinu. Pada level ini, biasanya disebut 'level menuju kondisi marjinal ekonomisasi order ketiga'. Dari tahapan tersebut terdapat tergambar dalam struktur ekonomi institusional pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur ekonomi institusional



Sumber: Williamsom, 2000

Dari analisis teori Williamson (2000) tentang pendekatan NIE terdapat pemahaman bahwa pendekatan konsep ekonomi sebagai kerangka analisis sistem pengembangan sistem sector public maka pada tahapan tiap level tersebut mampu menjelaskan terhadap sistem tradisi, norma, adat, budaya dan kebiasaan yang menjadi mindset perilaku dari manusia sehingga menjadikan tinggi angka pembiayaan dalam sistem pengembangan ekonomi pada sistem pemerintah desa sebagai lembaga yang berwenang.

Diera otonomi desa telah memberikan kewenang desa (*property raights*) untuk senantiasa didalam pembangunan dapat terlihat kebijakan sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada *system of rules*. Berada pada system, sering sekali kewenangan bagi pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menentukan bagaimana berlaku penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu konsep ekonomi kelembagaan bari (NIE) sebagai tools analysis terhadap kompleksitas pengelolaan kebijakan organisasi publik yang berkelanjutan dan sekaligus dapat dijadikan "umbrella" bagi masalah yang terjadi dalam kebijakan organisasi publik di Indonesia, dan serta menganalisis terhadap sistematisasi aturan-aturan yang menyangkut persoalan kewenangan, organisasi, penatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, hubungan hierarki, pengawasan, serta prosedur perencanaan dan administrasi.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui Pengembangan BUM Desa Sebagai Industri Promosi Ekspert Dengan Pendekatan New Institusional di Desa Winong Kecamatan Gempol Jawa Timur. Metode penelitian yang

diterapkan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi (Sugiyono, 2011).

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah (1) Observasi adalah salah satu langkah mendapatkan data dengan proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian sekaligus melakukan pencatatan mengenai informasi yang diperoleh dan memiliki kaitan dengan penelitian ini; (2) Wawancara adalah salah satu langkah untuk memperoleh dan mengumpulkan data melalui kegiatan dialog atau tanya jawab serta diskusi dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan mengenai objek dan masalah yang diteliti; (3) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi tersebut berbentuk beberapa jurnal yang relevan, buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data-data yang memiliki relevansi dengan kegiatan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Pengembangan BUM Desa Sebagai Industri Promosi Ekspor Dengan Pendekatan New Institusional di Desa Winong Kecamatan Gempol Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengembangan Lembaga Informal di Desa Winong

Desa menjadi sentra baru dalam menghadapi globalisasi, diberbagai penjuru dunia desa menjadi satu lokus atas majunya sebuah peradaba yang menghapus sekat (borderless) antara wilayah diberbagai dunia, terasanya nyata saat kebijakan di era jokowi dengan adanya dana desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)¹. Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamankan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat

desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional 2. Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu).

Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir.

Capaian target dalam pembangunan didesa winong dapat dilihat dalam penggunaan dana dan alokasi dana desa guna mendukung potensi peternakan/budidaya lele sebagai komoditas unggul. Sebagaimana desa winong yang memiliki 7 wilayah administratif (Dusun) dengan budidaya peternak lele sejumlah 45 peternak lele. Dalam waktu satu bulan menghasilkan sekitar 800-1000 kg . Selama ini pemasaran hanya pada wilayah desa pada bumdes guna menyediakan lele jumbo buat umkm, dan untuk memenuhi kebutuhan budidaya dalam penyediaan pakan diperoleh melalui kredit, dan sekaligus penyediaan modalnya.

Bagi masyarakat Desa Winong keberadaan usaha budidaya ikan lele sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perdagangan, baik skala rumah tangga maupun industri dalam kerangka tradisional, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai penjualan dilakukan pada skala pasar local dikecamatan gempol kabupaten kabupaten pasuruan, beberapa Pasar menjadi salah satu pusat perekonomian atau perdagangan disamping keberadaan pusat perdagangan modern. Fungsi pasar secara umum termasuk pasar gempol dan pulungan pada dasarnya didirikan dalam rangka untuk menunjang perkembangan perekonomian dengan memperhatikan pergerakan sektor-sektor ekonomi yang lain. Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasardidaerah kecamatan gempol menjadi pemasaran hasil budidaya ikan lele.

Budidaya ikan lele dirintis dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sebagaimana dimandatkan dalam kebijakan Kepada Desa Winong sebagai rencata pembangunan. Secara struktural, pengelolaan budidaya berada dibawah binaan pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan desa sekaligus

mampu menciptakan kesempatan kerja di wilayah kecamatan gempol khususnya di desa winong.

Sebagai satu-satunya potensi desa maka pemerintah desa winong berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat desa winong pemerintah juga mendorong produktifitas perkotaan khususnya maupun pedesaan pada umumnya. Tingginya permintaan barang hasil budi daya sebagai kebutuhan pokok yang ada di pasar wilayah desa winong mendorong semakin banyaknya dan meningkatnya pedagang sektor informal. Ada sekita 39 budidaya ikan lele yang dikembangkan oleh masyarakat desa winong sangat mendukung terhadap program budidaya ikan di air tawar atau kolam terus berkembang dengan luas kolam telah mencapai kurang lebih 34, 5 Ha yang tersebar di 19 kecamatan Kabupaten Pasuruan. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele.

Dalam perjalanannya, budi daya ini berkembang menjadi usaha atau bisnis yang menjanjikan. Karena memang menghasilkan dan keuntungannya pun jelas. Tak heran, jika usaha di bidang ini terus berkembang. Adapun lokasi tempat budi daya lele itu sendiri, warga atau pelaku usaha memanfaatkan lahan pekarangan rumah masing-masing. Umumnya warga membuat kolam dari terpal. Satu pekarangan minimal 2-3 kolam, bahkan lebih.

Pola perawatannya mudah dan pakannya tidak susah, usaha ini diminati oleh masyarakat Winong, dalam pengelolaannya Yang terpenting telaten dan memperhatikan sirkulasi air kolam. Masa panennya pun cepat, hanya butuh waktu hanya 2-3 bulan saja, menggeliatnya budi daya lele ini juga tak lepas dari perhatian dan peran serta Pemerintah desa Wionong. Di antaranya melibatkan BUMDEs dalam pembinaan sekaligus bantuan modal. Pemdes juga mengupayakan pelatihan dengan menggandeng instansi terkait, bahkan ikut membantu pemasarannya pula. Berbagai program sebagai usaha digarap serius dan menghasilkan yang luar biasa. Selam ini pemerintah desa memberikan perhatian ada saat saat panen masih pada pembelian ikan lelenya terjual laris dibeli tengkulak ataupun lesehan-lesehan di sekitaran Gempol

Budidaya ikan lele akhir-akhir didesa winong ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang dilakukan oleh beberapa warga ditengah era pasar bebasr, meski belum ada dampak sama sekali terhadap sistem pengelolaan dan pemasaran hasil ikan lele yang disebabkan ikan lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh banyak orang dan banyak petani budaya ikan lele yang masih merasa cukup dengan model penjualan sekarang yakni diwilayah pasar gempol dan sekitar desa winong. Padahal berdasarkan observasi potensi ikan lele didesa winong yang didukung air dan pola perawtan budidaya yang cukup baik, maka dapat menghasilkan rasanya yang lezat, ikan lele biasanya dijual dengan harga yang ramah di kantong, selain harganya yang murah dan mudah di dapat, ikan lele juga mempunyai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Hal ini menunjukkan bahwa indeks of heppynest para petani juga berpengaruh terhadap pola bisnis dan juga pola pengembangan usaha sebagai potensi yang memiliki orientasi pasar komoditi ekspor. Salah satu usaha ternak lele di Desa Karangkonang adalah “Lele Berkah Abadi”.



Gambar 2. Usaha Bapak Warso

Ternak lele ini adalah milik bapak Warso. Ternak lele ini sudah dimulai sejak tahun 2016. Ternak lele milik bapak Warso ini sudah memiliki nomor izin usaha yaitu: 122700144193. Jumlah tenaga kerja dari ternak Lele ini adalah 2 orang. Ternak lele ini terletak di RT: 07 RW: 01.

Untuk harga pasar dari ikan lele ini, disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan lelenya. Untuk perhari ini harga ikan lele Rp. 17.000/Kg. Omset

perbulan dari ternak ikan lele oleh bapak Warso adalah Rp. 9.500.000..Untuk pemasaran ternak Lele Berkah Abadi ini dipasarkan melalui facebook (Gambar 2).

Secara keseluruhan total jumlah produksi perikanan tawar mencapai 195,1 ton. Karena itu untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pembudidaya ikan tawar, Kementerian Perikanan dan Kelautan Pusat memberi bantuan Rp 650 juta, diberikan untuk 10 kelompok pembudidaya ikan air tawar pemula di Kabupaten Pasuruan (DKP 2009). Sentra pembudidaya komoditi ikan air tawar yang dipetakan berdasarkan Kecamatan yaitu lele di Kecamatan Beji; bawal tawar di Kecamatan Gempol; Patin di kecamatan Grati dan Beji; Nila dan mujaer di kecamatan Grati dan Winongan; Gurame di kecamatan Lekok, Rejoso



Gambar 3. Budidaya Lele disalah satu Warga

dan Rembang; Udang Galah di kecamatan Pandaan. Pembudidaya memilih usaha dibidang perikanan air tawar khususnya ikan lele karena memiliki potensi di Kecamatan Pandaan yang kaya akan mata air serta mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memasyarakatkan gemar makan ikan sehingga usaha dibidang budidaya merupakan usaha yang memiliki prospek sangat

baik, karena permintaan akan ikan lele sangat banyak. Teknologi yang digunakan pembudidaya ikan lele di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan masih ada yang bersifat tradisional. Sumber air yang digunakan untuk kegiatan budidaya ikan lele berasal dari sungai dan berasal dari pengairan irigasi. Lahan yang digunakan untuk pemeliharaan

ikan lele yaitu halaman di sekitar rumah. Sebagian menggunakan terpal sebagai tempat pemijahan dan pemeliharaan benih.

Desa winong menjadi salah satu desa yang dilirik untuk mendapatkan suntikan dana Hal ini karena lokasi desa winong memiliki potensi sehingga terkenal dengan sebutan kegiatan budidaya ikan lele dekat dengan sungai. Adanya pengamatan langsung dilokasi penelitian, kondisi alam desa winong cocok untuk melakukan kegiatan usaha budidaya ikan lele.

Kelembagaan Baru Ekonomi Sektor Informal “Budidaya Lele”

Peningkatan kehidupan masyarakat diberbagai sektor termasuk perekonomian merupakan tuntutan yang sekiranya wajar untuk diperhatikan oleh pemerintah desa winong. Salah satu upaya yang kiranya dilaksanakan adalah memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan dengan dasar aturan yang disepakati. Pedagang sektor informal sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal, keberadaanya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian masyarakat desa winong. Dinamika yang pesat dalam pembangunan desa winong berdampak untuk mendorong pertumbuhan usaha di sektor informal, keberadaan pelaku usaha sektor informal di kawasan desa winong kecamatan gempol banyak juga dampak negatif , yakni kebersihan lingkungan. Untuk itu, dalam rangka mengatur keberadaan budidata sektor informal khususnya bagi budidaya lele, berbagai upaya dilakukan Pemerintah desa winong melalui kegiatan penataan saluran air / drainase, pengaturan mekanisme pemberian izin, dan pengaturan mengenai pemberian sanksi, serta dengan melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengawasan serta pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam suatu kegiatan usaha baik formal maupun informal dibutuhkan hubungan kelembagaan yang baik antar sesama pelaku usaha maupun hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat berupa aturan-aturan yang melekat dalam kelembagaan atau institusi. Institusi sebagai aturan-aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, konstitusi

dan aturan informal seperti norma sosial, konvensi, adat istiadat (North, 1990).

Pembangunan ekonomi didesa winong sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi masyarakat didesa winong adalah sebagai proses peningkatan pendapatan dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat pedesaan yang diikuti dengan



Gambar 4. Musrenbang Desa Winong

peningkatan kualitas hidup dan kuantitas permukiman, peningkatan kualitas kelembagaan

sosial, psikologis dan budaya masyarakat. Sehingga pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya anggota masyarakat. Sebagaimana setiap kali musrenbang sebagai proses perencanaan pembangunan dalam penganggarannya telah mengalokasikan dalam program desa (lihat Gambar 4).bukti nyata komitmen atas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga dirilies oleh media online <https://surabayapagi.com/read/musrembangdes-desa-winong-menuju-desa-mandiri>

Sebagaiman dilansir oleh kepala desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dalam Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan tema " Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan berwawasan Lingkungan ". Dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 membahas agenda tahunan yang dilaksanakan tiap tahun, dan sebagai bahan informasi ke masyarakat agar bisa mengetahui sejauh mana kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan lain lainnya serta untuk menampung aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat RT.

Usulan yang harus diprioritaskan bukan hanya di pembangunan fisiknya saja, seperti jalan lingkungan dan bangunan lainnya. Namun untuk desa Winong kami akan memprioritaskan perencanaan pembangunan yang bisa mempunyai nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yaitu program yang bernilai tambah ekonomi seperti sudah ada pengelolaan produk produk makanan ringan dari kelompok ibu ibu, kemudian Pembibitan Lele juga bagus dikembangkan sebagai nilai tambah ekonomi yang berwawasan Lingkungan.

Orientasi kebijakan pemerintah desa winong menyaratkan dan mengarahkan desa Mandiri, kami akan melakukan tahapan - tahapan pembangunan supaya bisa mempunyai nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, yang secara teknis pembinaan, pelatihan, penyadaran masyarakat untuk berperan aktif membangun desa, selalu berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan PAD, maka perlu mengoptimalkan Bumdes, sebagai lembaga ekonomi masyarakat, dimana bumdes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi, bisa membantu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri.

Peningkatan ini akan menentukan pilihan bagi pemerintah desa untuk perubahan lebih baik dan menciptakan lingkungan yang membuat orang dapat menggunakan potensi penuh mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif (Shaffer 1989). Pola Pembangunan masyarakat pedesaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ini adalah proses di mana komunitas lokal tidak hanya dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, pendapatan, dan infrastruktur, tetapi juga membantu komunitas mereka menjadi lebih baik secara fundamental dan mampu mengelola perubahan. Fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat adalah sebagai lembaga yang memberikan jaminan hak kepemilikan dan akses yang relatif sama atas sumber daya ekonomi kepada masyarakat luas. dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dampak yang besar dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat terhadap mata pencaharian didalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan tentunya akan melibatkan partisipasi aktif dan banyak elemen kelembagaan pembangunan masyarakat terkait seperti modal sosial, sumber daya manusia modal, jejaring sosial, lembaga ekonomi, peluang usaha wirausaha atau industri pedesaan dan sebagainya.

Penelitian ini mendeskripsikan masalah dalam pencapaian pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan pembangunan masyarakat didesa winong. Secara khusus mendeskripsikan peran kearifan lokal dari modal sosial di masyarakat dan potensi ekonomi kelembagaan baru dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Sebagaimana Netar (2017) menjelaskan bahwa peran lembaga sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat akan mendominasi proses pembangunan ekonomi. Mereka menentukan sikap, motivasi dan kondisi untuk pengembangan. Jika institusinya elastis dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan selanjutnya menuju standar hidup yang lebih tinggi dan menginspirasi mereka untuk bekerja keras, pembangunan ekonomi akan terjadi dan sebaliknya yang mampu untuk pembangunan ekonomi.

Konsep dasar New Institutional Economics (NIE) adalah perilaku ekonomi seseorang atau kelompok yang sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Kelembagaan ini sangat kuat dan dalam hal ini dimaknai sebagai "aturan main" dalam suatu kelompok masyarakat, baik formal maupun informal. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi bagi pembangunan masyarakat pedesaan melalui kelembagaan ekonomi baru memerlukan prasyarat yang cukup serta dukungan seluruh elemen kelembagaan yang ada dalam masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat secara produktif. Semua individu dalam masyarakat dan elemen kelembagaan mengharapkan kemajuan dan harus melakukan perubahan yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Artinya, peran ekonomi lembaga baru diambil sebagai fasilitator atau aturan main untuk mengatasi ketimpangan, kemakmuran, dan keadilan bersama. Sementara itu, setiap perilaku partisipasi aktif individu dan masyarakat merupakan penentu kemajuan institusi. Karena lembaga adalah benda

mati, maka lembaga tidak dapat berkembang jika tidak ada individu atau kelompok dalam masyarakat yang mengembangkannya, dan sebaliknya individu dan kelompok masyarakat akan sulit dan tidak dapat berkembang dengan baik jika lembaga yang ada tidak memfasilitasi individu atau kelompok tersebut untuk berpartisipasi aktif. dan mengambil tindakan untuk kemajuan. Dengan kata lain, ekonomi kelembagaan baru terkikis sebagai aturan main dalam mendorong perilaku aktif masyarakat untuk menciptakan peluang usaha, efisiensi, daya pengaruh, produktivitas, pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta kemakmuran bersama.

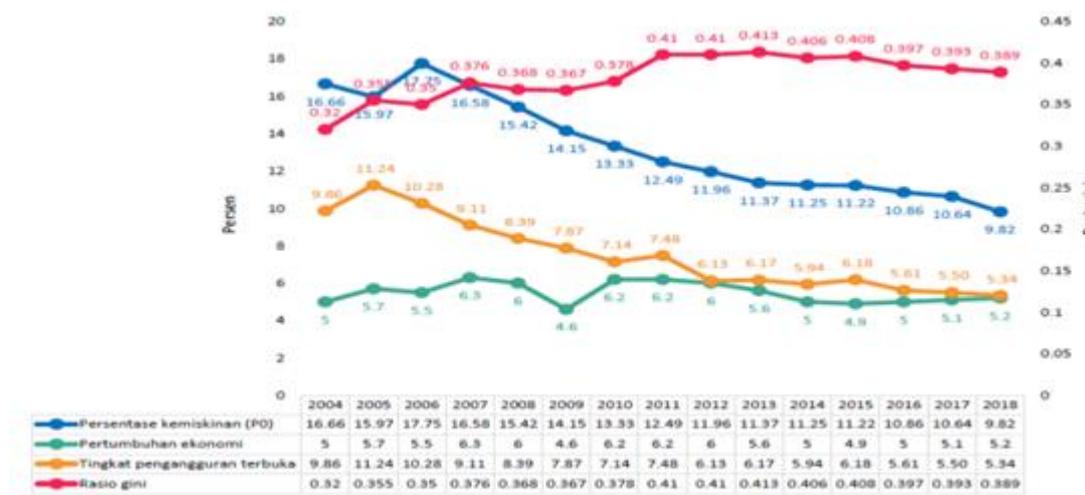
Tujuan utamanya dari hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan adalah untuk menggali dan menganalisis lebih dalam permasalahan pembangunan ekonomi sebagai upaya dalam membangun masyarakat pedesaan. Berbagai isu di desa winong yang terungkap di atas terutama; masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan pengangguran yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini harus diselesaikan melalui pembangunan ekonomi agar masyarakat pedesaan mampu berkembang secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Karena pembangunan ekonomi adalah bagian dari pengembangan masyarakat, variabel kelembagaan utama dari potensi ekonomi kelembagaan baru diusulkan sebagai solusi melalui ekonomi pedesaan. Sebagai data BPS Kecamatan Gempol bahwa Desa Winong (BPS; 2021).

Pembangunan ekonomi desa winong cukup berdampak dan berhasil salah satunya mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pedesaan. Kesejahteraan masyarakat desa winong merupakan dimensi ekonomi dan sosial. Artinya ada hubungan saling ketergantungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik di masyarakat didesa winong, tidak cukup hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhannya harus tinggi, kualitas manusia, prinsip humanistik dipertahankan dan ramah lingkungan dan kondisi sosial ditingkatkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai kebijakan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, namun yang lebih signifikan juga meningkatkan kualitas dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai, tetapi pembangunan ekonomi tidak mampu mengurangi masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan, maka pembangunan ekonomi ini belum dapat dikatakan berhasil pembangunan ekonomi adalah mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Kondisi demikian dijelaskan oleh Seers (1969), jika satu atau dua atau bahkan tiga kondisi tersebut tidak tersedia, maka pembangunan belum berhasil, meskipun pendapatan per kapita telah meningkat dalam

jumlah yang besar. Gambar 2 menunjukkan kondisi di Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir (era Presiden SBY dan Jokowi), ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, namun ketimpangan tetap stagnan pada tingkat yang tinggi, di atas 0,39% bahkan ketimpangan di tingkat pedesaan (Data BPS, 2021). kecenderungan meningkat sebagaimana Dudley Seers, maka pembangunan ekonomi di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil.

Gambar 5. Grafik Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan



Sedangkan data dikabupaten pasuruan ketimpangan(indeks Williamson) juga dilihat berdasarkan PDRB Perkapita. Ketimpangan wilayah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pendapatan penduduk di masing-masing kecamatan. Semakin tinggi ketimpangan, artinya pusat pertumbuhan pendapatan hanya dikuasai oleh beberapa wilayah. Sedangkan semakin rendah ketimpangan, artinya pembagian (sebaran) pendapatan penduduk di masing-masing kecamatan cenderung merata.

Hitungan ketimpangan wilayah (Indeks Williamson) di Kabupaten Pasuruan menggunakan data rasio penduduk kecamatan dan PDRB Perkapita (ADHB) kecamatan. Indeks Williamson pada tahun 2019 sebesar 0,258 (kategori rendah) meningkat di tahun 2020 menjadi 0.277 (rendah).Peningkatan ketimpangan ini dikarenakan adanya pergeseran peningkatan beberapa sektor produktif yang awalnya mengandalkan industri, tetapi setelah adanya Covid-19 beberapa sektor justru semakin berkembang pesat. Tetapi, secara keseluruhan tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan masuk kategori rendah. Kategori rendah ini dapat diartikan bahwasannya sebaran ketimpangan pendapatan di masing-masing kecamatan Kabupaten Pasuruan tergolong merata.Pemerataan pendapatan di masing-masing kecamatan pada masa Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- 1) Sebagian besar masyarakat sama-sama merasakan dampak adanya Covid-19 sehingga terjadipenurunan pendapatan di masing-masing kecamatan secara merata.
- 2) Beberapa sektor produktif (pertanian, peternakan, perikanan, wisata, UMKM, industri besar, dan perdagangan) di masing-masing kecamatan mengalami pelambatan bahkan penurunan pertumbuhan secara merata.
- 3) Perekonomian terbesar di Kabupaten Pasuruan sangat mengandalkan sektor industri yang pada masa Covid-19 terdampak sangat besar walaupun hingga saat ini masih dalam kategori unggul.
- 4) Sebaran sektor tumbuh yang merata umumnya berada di sektor pertanian dan peternakan yang notabene berada di hampir setipa kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Berbeda halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan adalah faktor teknologi dan pemasaran. Selanjutnya adalah faktor skill dan kemitraan, faktor sumberdaya alam, faktor aksesibilitas, faktor sosial, faktor sumberdaya manusia dan yang terakhir adalah faktor infrastruktur dasar. Kuatnya pengaruh faktor teknologi dan pemasaran pada tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk perdagangan online sehingga faktor tersebut menjadi hal yang paling mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Pasuruan. Data Indeks Williamson di Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2018 - 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Williamsom di Kabupaten Pasuruan Periode 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Indeks Williamsom	0,256	0,258	0,277

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2020

Agar proses pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif, maka harus pula dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup per kapita dan kebijakan pemanfaatan sumber daya manusia didesa winong, untuk mencapai kemajuan individu dan sosial di setiap negara (Haller, 2012). Kualitas hidup merupakan konsep multidimensi yang didasarkan pada hubungan kausal yang rumit dari hubungan timbal balik variabel yang sulit diukur karena tercipta dari dua dimensi subjektif pribadi dan psikologis (Murgas, 2015). Oleh karena itu, bagian terpenting dari kualitas hidup adalah fenomena pencapaian kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian, untuk memperkuat sistem kelembagaan ekonomi dan sosial, serta tata kelola ekonomi dan politik yang baik dan benar. Program kebijakan pemerintah desa winong dalam penyediaan dana desa merupakan program yang baik, sebagaimana visi

dan misi dinyatakan relevans. Visi kepala desa menyatakan bahwa rakyat adalah sumber utama pembangunan karena tujuan pembangunan dikabupaten pasuruan sebagai mengembangkan erokonomian dan sikap tileransi seutuhnya dan mengembangkan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, orang adalah subjek utama dan bukan sebagai objek dalam pembangunan.

Dengan meningkatnya modal manusia dan sosial maka kreativitas, inovasi dan produktivitas akan semakin kuat dan kualitas pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum mumpuni karena pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menjadi bukti bahwa pencapaian pemerataan ekonomi pun masih dapat dinyatakan tidak berhasil apalagi pemerataan sosial yang sejahtera masih belum terpenuhi. Saya menyarankan bahwa ada dua alasan utama yaitu kualitas modal manusia dan modal sosial dan juga dalam pengembangan jejaring.

Dalam pengembangan New Econois Institusi dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menjadi leading sector sebagai penunjukan apakah insentif pengalokasian anggaran dan ketepatan sasaran guna mempertimbangkan factor efisiensi. Hal demikian ini menjadi fungsi utama pemerintah sebagai fungsi utama Negara sebagai regulatory, production, distribution. Hal ini ditujukan untuk menstabilkan ekonomi akro, mengeroksi kinerja produk komodity ekspor terhadap pasar global, pengalokasian anggaran untuk pengembangan kelembagaan pada sentra komodity lainnya, dan percepetan proses persaingan kuatitas produk (manajerial)

Hal demikian ini akan mampu menghadi persaingan global, sebab potensi yang ada di tengah masyarakat menjadi modal social dan modal manusia adalah kunci didalam pengembangan New Institusi Ekonomi, sebagai mana (Peet, 1997) bahwa seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Negara / kewilayaan yang dikelola kurang baik, maka tidak akan berdampak merata dalam kesejahteraan masyarakat. Sehingga dbutuhkan peran Negara / pemerintah didalam penguatan institusi organisasi sector public ditengah lingkungan institusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengembangan institusi ekonomi dipedesaan harus dilakukan sebab tantangan akan adanya system globalisasi mendorong terhadap upaya bagaimana desa mampu berproses secara baik dan mampu membantu dalam menjawab tantangan globalisasi dan industrialisas. Kemudahan yang didapat dalam pengembangan institusi tak lepas akan adanya perana modal social dan modal manusia sebagaimana norma, adat dan stuktur social menjadi hal yang mendasar

dalam pembangunan ekonomi. Dalam era otonomi desa pun desa diperlukan dalam penguatan jejaring dengan mengambil peranan dalam protektif yang bentuk anggaran yang dijadikan instrument dalam pengembangan komodity ekspor salah satunya budidaya ikan lele sebagai komodity ekspor. Penguatan sistem pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran menjadi tanda bahwa pemerintah hadir ditengah system persaingan global untuk menakar akan kegagalan pasar global dan percepatan pembangunan potensi lokal sebagai perwujudan desa global.

REFERENSI

- Adam Smith, 1759. "The Theory of Moral Statements" dalam Wardani 2009," printed for Andrew Millar, in the Strand; and Alexander Kincaid and J. Bell, in Edinburgh"
- Coase, R.H., 1993. "Coase on Posner on Coase". *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 149, pp. 96-98
- Chen, Chenga, Michael Woodsb, Jianglong Chena, Yongqiang Liucin long Gaoad (2019). "Globalization, state intervention, local action, and rural locality reconstitution - A case study from rural China". Volume 93, November 2019, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102052>
- Creswell, J.W., 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Darlinton, I and Scott, D., 2002. *Qualitative Research in Practice Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Furobotn, E.G. and Richter, R., 1998. *Institutions and Economics Theory, the Contribution of the New Institutional Economics*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Harris, John, et al., 1995. "Introduction: Development and Significance of NIE" dalam John Harris, et al., *The New Institutional Economics and Third World Development*. London and New York: Routledge.
- Jaya, Wihana K., 2010. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Gajah Mada Press.
- Larsson, T. (2001). *The Race to the Top: The Real Story of Globalization*. U.S.: Cato Institute.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626-642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Lilncolin, Arsyad (2004). "Ekonomi Pembangunan". STIE Yogyakarta
- Muharami, Ghufrani & Tanti Novianti (2018). "Analisis Kinerja Ekspor Komoditas Karet Indonesia Ke Amerika Latin". *Jurnal Agribisnis Indonesia* (Vol 6 No 1, Juni 2018); halaman 15-26 15 ISSN 2354-5690; E-ISSN 2579-3594
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitataif*, Ed. Rev, Jakarta: Rosdakarya.

North, D.C., 1990. *Institutions: Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.

North, D.C., 1993. "Institutions and Credibility Commitment". *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 149:11-23.

Sibolon, Freddy (2013). "Strategi Pemasaran Global Di Pasar Indonesia". *BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 405-413.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Williamson, Oliver E., 2000. "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead". *Journal of Economics Literature* 38(3):595-613.